

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap orang harus memiliki kesehatan yang baik. Sakit membuat seseorang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sehingga kesehatan adalah modal setiap orang untuk menjalani kehidupan yang layak.

Kesehatan adalah salah satu hak setiap warga negara, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah sebagai pengelola negara, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Ini karena sebagai kebutuhan yang dasar, setiap orang bertanggung jawab untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga setiap orang memiliki kesehatan yang optimal.

Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan pelaksana tugas Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Urusan pemerintah yang termasuk dalam urusan wajib diantaranya adalah tentang kesehatan. Urusan pemerintahan wajib tersebut di atas merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini disebutkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

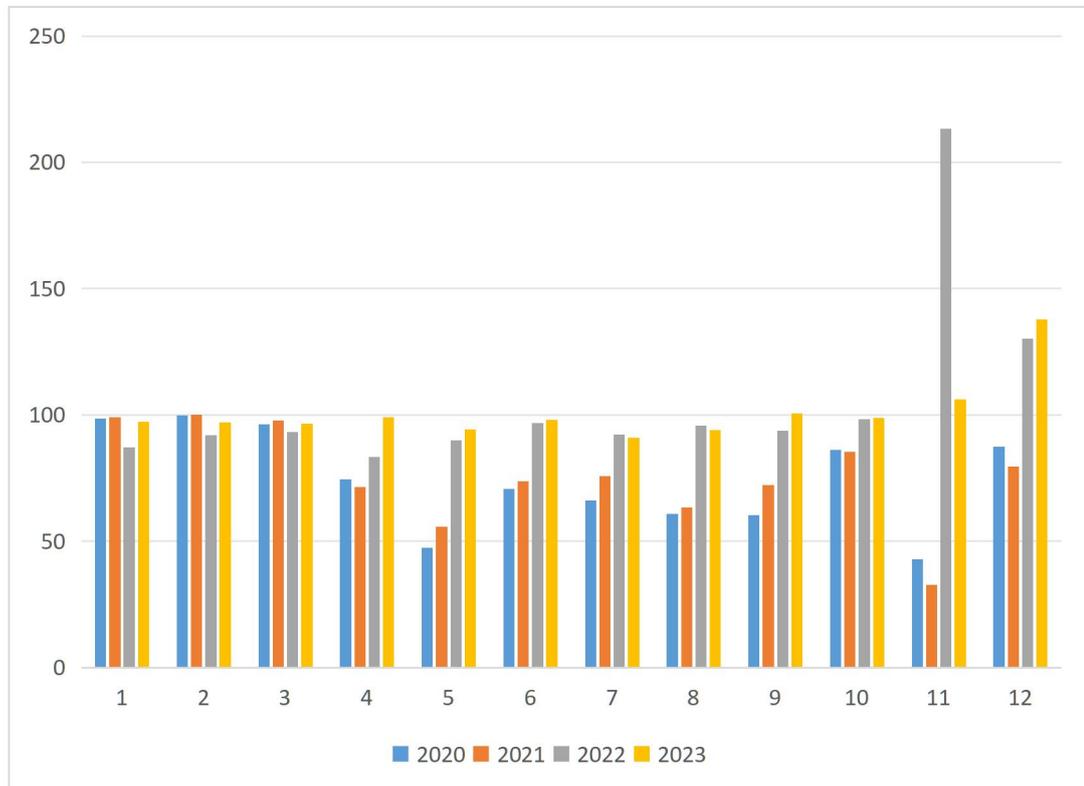
Undang-undang tersebut kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal,

menjelaskan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ada dua belas jenis pelayanan kesehatan dasar meliputi : (1) Pelayanan kesehatan pada ibu hamil; (2) Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin; (3) Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir; (4) Pelayanan kesehatan pada balita; (5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; (6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif; (7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; (8) Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi; (9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; (10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; (11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan (12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) (Peraturan Pemerintah RI, 2018)

Pemerintah membuat standar pelayanan minimal untuk mengatur tugas wajib pemerintah daerah di tingkat propinsi, kabupaten, dan kota madya. Standar ini memiliki setidaknya dua tujuan: (1) membantu pemerintah daerah memberikan layanan publik yang sesuai kepada masyarakat dan (2) membantu masyarakat mengawasi kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan. Pemerintah adalah pemberi layanan kepada masyarakat yang berupaya agar tercipta negara yang makmur.

Standar Pelayanan Minimal maka semua pelayanan dasar yang menjadi indikator tersebut memiliki target 100%. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan, Capaian standar pelayanan minimal terdiri dari mutu dan jenis pelayanan dasar. Capaian ini dilaporkan Bupati sebagai kinerja Kabupaten.



Keterangan :

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil                  | 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus  |
| 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin               | 10. Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat  |
| 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir            | 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis   |
| 4. Pelayanan kesehatan balita                     | 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) |
| 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar |  |
| 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif        |  |
| 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut           |  |
| 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi       |  |

Gambar 1

Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023

Sumber : Data Laporan Tahunan Dinas Kesehatan

Pencapaian indikator standar pelayanan minimal di Dinas Kesehatan

Kabupaten Sleman tahun 2023 sudah mengalami peningkatan namun belum

seluruhnya mencapai target. Terdapat 9 indikator yang belum tercapai dan masih perlu ditingkatkan capaiannya.

Tabel 1  
Daftar Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Tiap Puskesmas

No	Nama Puskesmas	Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (%)	
		2022	2023
1.	Moyudan	100,00	85,98
2.	Minggir	97,34	96,83
3.	Seyegan	95,04	90,30
4.	Godean I	92,94	95,58
5.	Godean II	69,08	95,64
6.	Gamping I	97,71	98,90
7.	Gamping II	92,82	98,32
8.	Mlati I	98,05	98,55
9.	Mlati II	91,42	93,29
10.	Depok I	87,84	85,68
11.	Depok II	100,37	99,94
12.	Depok III	91,61	97,77
13.	Berbah	90,75	94,93
14.	Prambanan	101,41	85,02
15.	Kalasan	78,79	76,34
16.	Ngemplak I	97,08	99,25
17.	Ngemplak II	104,89	93,08
18.	Ngaglik I	80,76	99,96
19.	Ngaglik II	99,84	99,91
20.	Sleman	71,29	95,16
21.	Tempel I	96,48	95,45
22.	Tempel II	128,05	100,00
23.	Turi	79,94	97,00
24.	Pakem	98,42	91,51
25.	Cangkringan	109,30	96,70
Dinas Kesehatan		92,31	90,94

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan

Pencapaian standar pelayanan minimal pada indikator pelayanan Kesehatan pada lanjut usia tahun 2022 dan 2023 menunjukkan variasi ditingkat Puskesmas. Indikator tersebut merupakan capaian terendah pada

tahun 2023 dan terdapat penurunan capaian dari tahun 2022. Dalam periode tersebut, pencapaian terendah terdapat di Puskesmas Kalasan dengan 76,34% dan pencapaian tertinggi terdapat di Puskesmas Tempel II dengan 100%. Ketercapaian tersebut memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut adalah pola kepemimpinan dari pimpinan Puskesmas dengan jabatan Kepala Puskesmas.

Pusat Kesehatan Masyarakat atau UPT Puskesmas merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan. Di Kabupaten Sleman memiliki 25 Puskesmas yang tersebar di 17 kapanewon. Setiap Puskesmas memiliki karakteristik kepemimpinan yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang bekerja untuk memenuhi tujuan organisasi tersebut. Salah satu indikator keberhasilan tujuan tersebut adalah capaian target standar pelayanan minimal pada masing-masing Puskesmas. Profil keberhasilan dari seluruh Puskesmas merupakan profil Dinas Kesehatan.

Gaya atau pola kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi. Pemimpin dalam hal ini adalah Kepala Puskesmas harus dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada untuk dapat meningkatkan kinerja puskesmas. Kesalahan dalam bertindak dapat mengakibatkan penurunan kinerja dari bawahan. Menurut teori Jalur- Tujuan (*path-goal*) adalah tentang bagaimana seorang pemimpin memotivasi

bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Northouse, 2013) Dalam teori tersebut diuraikan bahwa pemimpin yang baik adalah yang mampu membangun karakter *directive*, mendukung, partisipatif dan berorientasi pada prestasi. Kombinasi dari keempat pola kepemimpinan tersebut diyakini dapat memberikan dampak besar bagi bawahan dalam memotivasi kinerjanya. Dengan motivasi yang tinggi, pencapaian dari kinerja puskesmas dapat meningkat dan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dari data pendahuluan diperoleh informasi bahwa capaian indikator standar pelayanan minimal di puskesmas belum tercapai. Salah satu indikator yang belum tercapai adalah capaian pelayanan kesehatan lansia. Dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa pola kepemimpinan di Puskesmas Kalasan lebih cenderung pada pola mendukung dan pola kepemimpinan di Puskesmas Tempel II cenderung pada pola *directive*. Pola kepemimpinan di Puskesmas Tempel II lebih efektif dalam pencapaian standar pelayanan minimal indikator pelayanan kesehatan lansia.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui gambaran pola kepemimpinan terhadap pencapaian standar pelayanan minimal di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2023.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah : “Bagaimana gambaran pola

kepemimpinan terhadap pencapaian standar pelayanan minimal di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2023 ?”

### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana gambaran pola kepemimpinan terhadap pencapaian standar pelayanan minimal di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2023.

#### 2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui gambaran pola kepemimpinan di seluruh puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

b. Untuk mengetahui gambaran capaian standar pelayanan minimal pada setiap indikator standar pelayanan minimal di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

c. Untuk mengetahui gambaran ketercapaian standar pelayanan minimal pada setiap puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

Dapat menentukan kebijakan terkait pembinaan dan pengembangan kompetensi pejabat, khususnya pada jabatan kepala puskesmas di Puskesmas secara lebih tepat.

#### 2. Puskesmas

Dapat menjadi ukuran pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam melaksanakan standar pelayanan minimal di Puskesmas.

### 3. STIKES Wira Husada Yogyakarta

Penelitian ini dapat digunakan oleh Institusi untuk memperkaya literasi di bidang manajemen sumber daya manusia kesehatan.

### 4. Peneliti

Sebagai bahan pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam bidang penelitian sumber daya manusia serta untuk mendapatkan gambaran nyata tentang manajemen sumber daya manusia kesehatan.

## E. Keaslian Penelitian

1. “Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan Terhadap Kualitas Pelayanan UKM Di Puskesmas Ciomas”. (Zahra et al., 2022)  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Ciomas melakukan upaya manajemen SDM Kesehatan dengan baik, tetapi ada beberapa masalah yang belum diselesaikan. Karena itu, SDM memiliki tanggung jawab strategis untuk meningkatkan pelayanan usaha kesehatan masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat Ciomas. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pelaksanaan setiap program sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja manusia dan berdampak pada produk eksternal yang dihasilkan. Karena itu, untuk memahami hubungan antara SDM dan pelayanan usaha kesehatan masyarakat di Puskesmas Ciomas, manajemen SDM yang baik dan mampu menangani masalah yang muncul. *Case report* ini disusun menggunakan *review literatur* dan wawancara mendalam. Persamaannya adalah variabel yang menjadi objek penelitian adalah kebijakan tentang pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.

Perbedaannya adalah penggunaan metode penelitiannya. Dengan metode mix-metode dapat diperoleh gambaran yang lebih luas.

2. “Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Siempat Rube Kabupaten Pakpak Barat” (Frangky et al., 2020). Menurut hasil penelitian, kualitas tenaga kerja manusia memiliki efek positif dan signifikan pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Siempat Rube Kabupaten Pakpak Barat. Persamaannya adalah topik terkait manajemen SDM. Perbedaannya adalah metode dan variable yang diteliti. Dengan metode mix-metode dapat diperoleh gambaran yang lebih luas.
3. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otokratis, Demokratis, Dan Bebas Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Berau” (Siti, 2022) . Menurut hasil pengujian statistik (uji t) antara variabel pola kepemimpinan otokratis terhadap kinerja, nilai thitung sebesar 2,302 lebih besar dari ttabel 2,00758, dan hasil pengujian statistik (uji t) antara variabel pola kepemimpinan demokratis terhadap kinerja, nilai thitung sebesar 6,860 lebih besar dari ttabel 2,00758, menunjukkan bahwa variabel pola kepemimpinan demokratis memengaruhi kinerja pegawai/tenaga kesehatan secara signifikan. Persamaannya adalah variabel yang digunakan. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan metode yang digunakan. Dengan metode mix-metode dapat diperoleh gambaran yang lebih luas.
4. “Gambaran Kepemimpinan Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Di SMA Adabiah Padang” (Hanum et al., 2018). Hasil penelitian menunjukkan gambaran kepemimpinan pembina kegiatan muatan lokal pramuka telah

berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan keterlibatan murid dalam kegiatan tersebut. Persamaannya adalah variabel yang digunakan adalah pola kepemimpinan, Perbedaannya adalah pada tema yang digunakan yaitu tentang pendidikan dan metode yang digunakan. Dengan metode mix-metode dapat diperoleh gambaran yang lebih luas.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pola kepemimpinan di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 68% *directive*, 16% mendukung, 16% partisipatif dan 0% berorientasi pada prestasi.
2. Capaian standar pelayanan minimal Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada tahun 2023 telah mampu memenuhi 9 dari 12 indikator.
3. Ketercapaian indikator standar pelayanan minimal di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada tahun 2023 yaitu kategori pencapaian baik sebesar 4%, kategori cukup sebesar 72% dan 24% dengan kategori kurang.

#### B. Saran

1. Menggalang komitmen bersama lintas sektor dengan memperkuat karakter Kepala Puskesmas untuk selalu melibatkan lintas sektor di wilayah kerja.
2. Melaksanakan *self assesment* untuk dapat menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal yang lebih baik.
3. Melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas melalui peningkatan pendidikan.

Meningkatkan literasi perkembangan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia dan melanjutkan penelitian yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmin, Ningsih, S. R., Asri, A. malik darmin, Adnan, & Gufran. (2024). *The Relationship between the Leadership Style of the Head of the Health Center and the Performance of Health Workers at the Sangtombolang Health Center*. 7(2), 362–371.
- Fauziyyah, S., & Cadith, J. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di Puskesmas Suradita Kabupaten Tangerang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 27–37. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.139>
- Frangky, S., Silitonga, M., & Saragi, S. (2020). *Pengaruh Kualitas Sdm Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*. 27–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/jpr.v7i1.1373>
- Fulk, J., & Wendler, E. R. (1982). Dimensionality of leader—subordinate interactions: A path—goal investigation. *Organizational Behavior and Human Performance*, 30(2), 241–264. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(82\)90220-3](https://doi.org/10.1016/0030-5073(82)90220-3)
- Guerrero, E. G., Frimpong, J., Kong, Y., Fenwick, K., & Aarons, G. A. (2020). Advancing theory on the multilevel role of leadership in the implementation of evidence-based health care practices. *Health Care Management Review*, 45(2), 151–161. <https://doi.org/10.1097/HMR.0000000000000213>
- Halpin, & Winner. (1957). *Kajian Ohio State*.
- Hanum, H., Solfema, S., & Jalius, J. (2018). Gambaran Kepemimpinan Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SMA Adabiah Padang. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 6(1), 42. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.9470>
- Heru Marwanto, I. (2014). Gaya Kepemimpinan Kepala Puskesmas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(2).
- House, R. J., & Mitchell, R. R. (1974). Path-Goal Theory of Leadership. *Journal Of Contemporary Business*, 3, 81–97.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pub. L. No. 59 (2021).
- Indrawan, D. C. (2023). *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Pada Puskesmas Ngagel Rejo di Kota Surabaya dan Faktor Yang Mempengaruhi*. 3(03), 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>

- Kurniawati, N., & Sartinah, P. E. (2016). Pengaruh Metode Bercakap-Cakap Berbasis Media Pop Up Book Terhadap Kemampuan Berbicara Anak Kelompok a. *Jurnal PAUD Teratai*, 5, 68–72.
- Muchlisin, R. (2021). *Locus of Control (Pengertian, Aspek, Jenis dan Karakteristik)*. <https://www.kajianpustaka.com/2021/02/locus-of-control.html>
- Northouse, P. G. (2013). *Leadership, Theory and Practice*. SAGE Publications, Inc.
- Pardosi, J., & Utari, T. I. (2022). Effective principal leadership behaviors to improve the teacher performance and the student achievement. *F1000Research*, 10, 1–29. <https://doi.org/10.12688/f1000research.51549.2>
- Peoni, H. (2014). Pengaruh Karakteristik Individu dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen (Persero) Cabang Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis UNSRAT*, 3(001), 1–15.
- Peraturan Pemerintah RI. (2018). Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. *Pemerintah Republik Indonesia*, 1–35. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67029/pp-no-2-tahun-2018>
- Putri, A. A., Mulyadi, A., & Sampurna, R. H. (2022). Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Di Puskesmas Nagrak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Governansi*, 8(2), 91–98. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i2.4430>
- Rahayu, E. S. E. (2012). Analisis Pengaruh Pengembangan Kepemimpinan Diri Kepala Puskesmas terhadap Kinerja Puskesmas Analysis Influence Self Leadership Development of the Head of Public Health Centers on Performance of Public Health Centers. *J. Adm. Kebijak. Kesehatan*, 10(3), 165–168.
- Rasifa, R. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Puskesmas terhadap Kualitas Pelayanan Pasien di Puskesmas Kota Bau Bau. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 3(2)(2021), 34–39.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pub. L. No. 20, 1 (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17, 1 (2023).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, 1 1 (2019).

- Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pub. L. No. 4, 1 1 (2019).
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23, 17 1 (2014). file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias\_ALAD\_11\_Nov\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2007). *Organizational Behavior, Twelfth Edition* (12 ed.). Pearson Education, Inc.
- Siti, A. (2022). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otokratis, Demokratis, dan Bebas Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau*. [http://repository.umberau.ac.id/id/eprint/77/1/SITI\\_AISYAH\\_18610128 .pdf](http://repository.umberau.ac.id/id/eprint/77/1/SITI_AISYAH_18610128.pdf)
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.)). CV. ALFABETA.
- Syapitri, H., Amila, & Aritonang, J. (2021). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan* (A. H. Nadana (ed.); Cetakan I). Ahlimedia Press.
- Tewal, B., Adolfina, Ch.H.Pandowo, M., & Tawas, H. N. (2017). *Perilaku Organisasi* (Cetakan Pe). CV. Patra Media Grafindo.
- Uyun, N. (2021). *Kekuasaan, Kewenangan, Tanggung Jawab dan Eligasi*. 1–11. <https://osf.io4cqmr/download/?format=pdf>
- Veri, Pratiwi, R. D., & Ginting, S. H. (2021). HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA PUSKESMAS DENGAN KINERJA PEGAWAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI PUSKESMAS SETU KOTA TANGERANG SELATAN. *Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 43–51.
- Zahra, A., Shafa, F., Mulya, F., Tiara, I., Sangha, S., & Trisnawati, W. (2022). *Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan Terhadap Kualitas Pelayanan Ukm Di Puskesmas Ciomas*. *June*.
- Zulfa, F. L., & Sunarto. (2023). Perbandingan Implementasi Kebijakan Anggaran dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Gamping 1 dan Puskesmas Salaman 1. *Berkala Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat (Scientific Periodical Journal Of Medicine And Public Health)*, 1(1), 19–28. <https://doi.org/10.20885/bikkm.vol1.iss1.art3>